



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NEIL EDWIN
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN UMUM
3. NHK : 139604

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.984.905.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 93 m2/54 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 249.572.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 36 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 361.116.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 159 m2/125 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 854.217.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 209 m2/108 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , WARISAN Rp. 520.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **147.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 99.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
3. MOTOR, HONDA H1882N4110 A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 12.500.000
4. MOTOR, YAMAHA B3W A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
5. MOTOR, TVS N282 AT Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **67.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.132.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.330.905.000
III. HUTANG	Rp.	6.187.122
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.324.717.878

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.